BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Akuntansi Keuangan Daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi. Hal itu disebabkan adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia yang me "reformasi" pengelolaan keuangan daerah. Pada UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang berisi tentang perlunya dilaksanakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Suatu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam membiayai pembangunan yang sedang dilaksanakan diperlukan suatu anggaran. Dalam UU No.5 1974 tentang Pokok Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan pengaturan Sumber Daya Nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju

masyarakat madani, sebagai konsekuensi dari pemberian Otonomi Daerah tersebut. Pemerintah Daerah mengemban tanggungjawab dan kewajiban yang besar. Tanggungjawab tersebut dapat disusun dalam proses kehidupan APBD yang disusun dalam siklus anggaran.

Salah satu tanggungjawab dari siklus anggaran tersebut adalah pelaksanaan APBD yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. Dalam pelaksanaan APBD perlu mendapat perhatian khusus dengan perhitungan yang seksama dalam menentukan besarnya dana per triwulan, per semester, dan per tahun secara tepat dan akurat, sehingga pengelolaan anggaran belanja rutin dalam pelaksanaannya mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pelaksanaan anggaran ini juga berkaitan erat dengan jaringan prosedur yang terbentuk dalam sistem akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu bagaimana prosedur pelaksanaan atau tata cara pengelolaan dana di bagian keuangan Pemerintah Daerah. Untuk kegiatan dan belanja negara. Sesuai dengan informasi akuntansi yang terstruktur yaitu tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya.

Berkaitan dengan permasalahan diatas maka penulis menyusun laporan Kerja Praktek ini dengan judul : **"PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari pelaksanaan Kerja Praktek ini adalah untuk memperoleh data mengenai bagaimana prosedur akuntansi keuangan di daerah dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh program studi S1, dan memperoleh pengalaman dalam menyusun suatu karya tulis yang bersifat ilmiah.

Tujuan dari Kerja Praktek adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui formulir-formulir yang digunakan dan dibutuhkan dalam Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah
3. Untuk mengetahui Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan Kerja Praktek bagi Perusahaan

- Sebagai bahan tinjauan dan masukan sehubungan dengan pelaksanaan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah.
- Sebagai suatu cara ikut serta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kegunaan Kerja Praktek bagi Peserta Kerja Praktek

- Sebagai kajian untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai tata cara Akuntansi Keuangan Daerah.

- Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan laporan sebagai salah satu syarat penunjang pelaksanaan Kerja Praktek.
- Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan laporan sebagai salah satu syarat penunjang pelaksanaan Kerja Praktek.
- Sebagai perbandingan antara teori yang disampaikan di perkuliahan dengan Kerja Praktek di lapangan.
- Mempersiapkan diri menjadi bagian dari anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam lapangan pekerjaan.

Kegunaan Kerja Praktek bagi Instansi Pendidikan

- Sebagai suatu alat komunikasi terhadap kurikulum yang digunakan.
- Hasil Kerja Praktek ini dapat juga sebagai bahan informasi dan sarana yang diharapkan dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dan masukan untuk langkah penetapan Kerja Praktek lebih lanjut.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode penulisan merupakan tahapan – tahapan dalam melakukan peninjauan, adapun tahapan – tahapan yang penulis lakukan adalah berdasarkan :

1. Studi Kepustakaan

   Yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dengan mempelajari buku – buku, literature, dokumen – dokumen lainnya serta

catatan – catatan yang diterima selama masa perkuliahan yang berhubungan dengan masalah yang penulis kemukakan.

2. Observasi

   Yaitu mengadakan pengamatan dan penelitian langsung di lapangan yang menjadi objek Kerja Praktek dan penelitian.

3. Wawancara

   Yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab secara langsung dengan para pejabat yang bersangkutan serta para pegawai di lingkungan kantor.

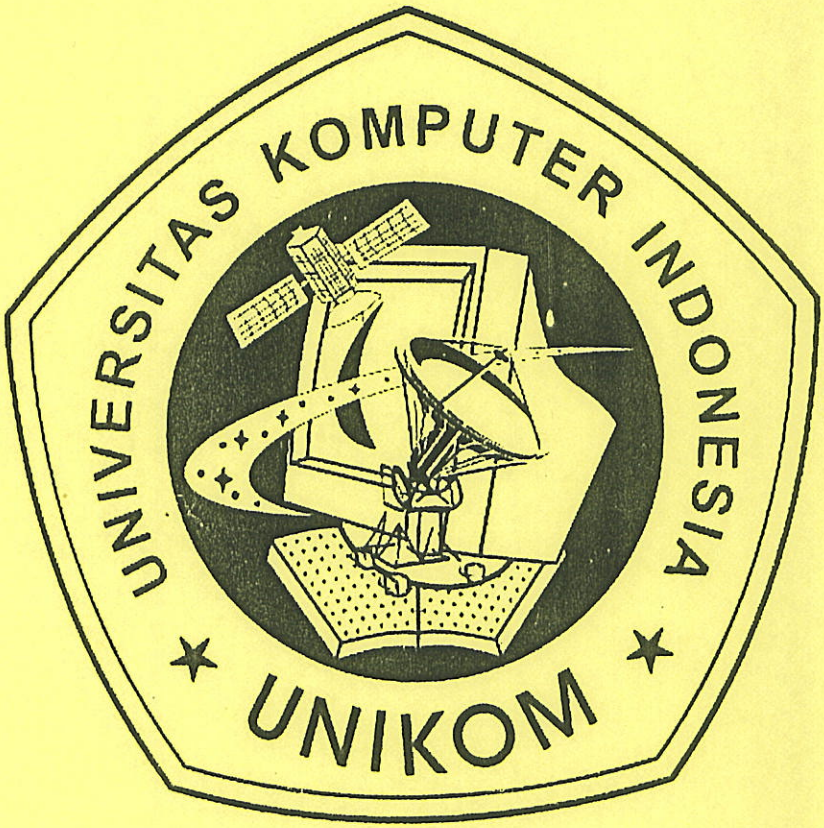
4. Dokumentasi

   Yaitu studi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang ada pada perusahaan.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek pada Kantor Pemerintah Kota Bandung di Bagian Keuangan yang beralamat di Jalan Wastu Kencana No.2 Bandung.

Lama Kerja Praktek ini mulai dari tanggal 21 September 2004 sampai 20 Oktober 2004.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM